

LAPORAN

KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

(LKPJ)

TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-NYA, sehingga Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar (DPMPTSP) dapat disusun.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada pelaksana pemerintahan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Tersusunnya LKPJ Tahun 2025 ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal meskipun masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025.

Semoga LKPJ Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini dapat bermanfaat terutama sebagai bahan evaluasi bagi yang berwenang untuk menilai kinerja staf Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

H. Andi Ros Irma, S.Sos.
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19701001 199203 2 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.2. Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi	2
1.3. Jumlah aparatur sipil negara, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan Jumlah Pejabat Struktural	5
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	7
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	7
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	9
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan indicator Kinerja Utama	13
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	14
2.1.4. Analisis kesesuaian Antra Kegiatan dengan Target Kinerja Proram yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	15
2.1.5. Inovasi	15
2.2. Kebijakan Daerah (Perda dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat daerah dan titapkan oleh Kepala Daerah	18
2.3. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025	18
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	20
3.1. Tugas Pembangunan yang Dilaksanankan	21
3.2. Hambatan – Hambatan	21
BAB IV PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (KPTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

- a) Peringkat : B
- b) Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP) Benteng Kab. Kepulauan Selayar
- c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com
- d) Titik koordinat : S 6,11924, E 120,467141
- e) Foto kantor



1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

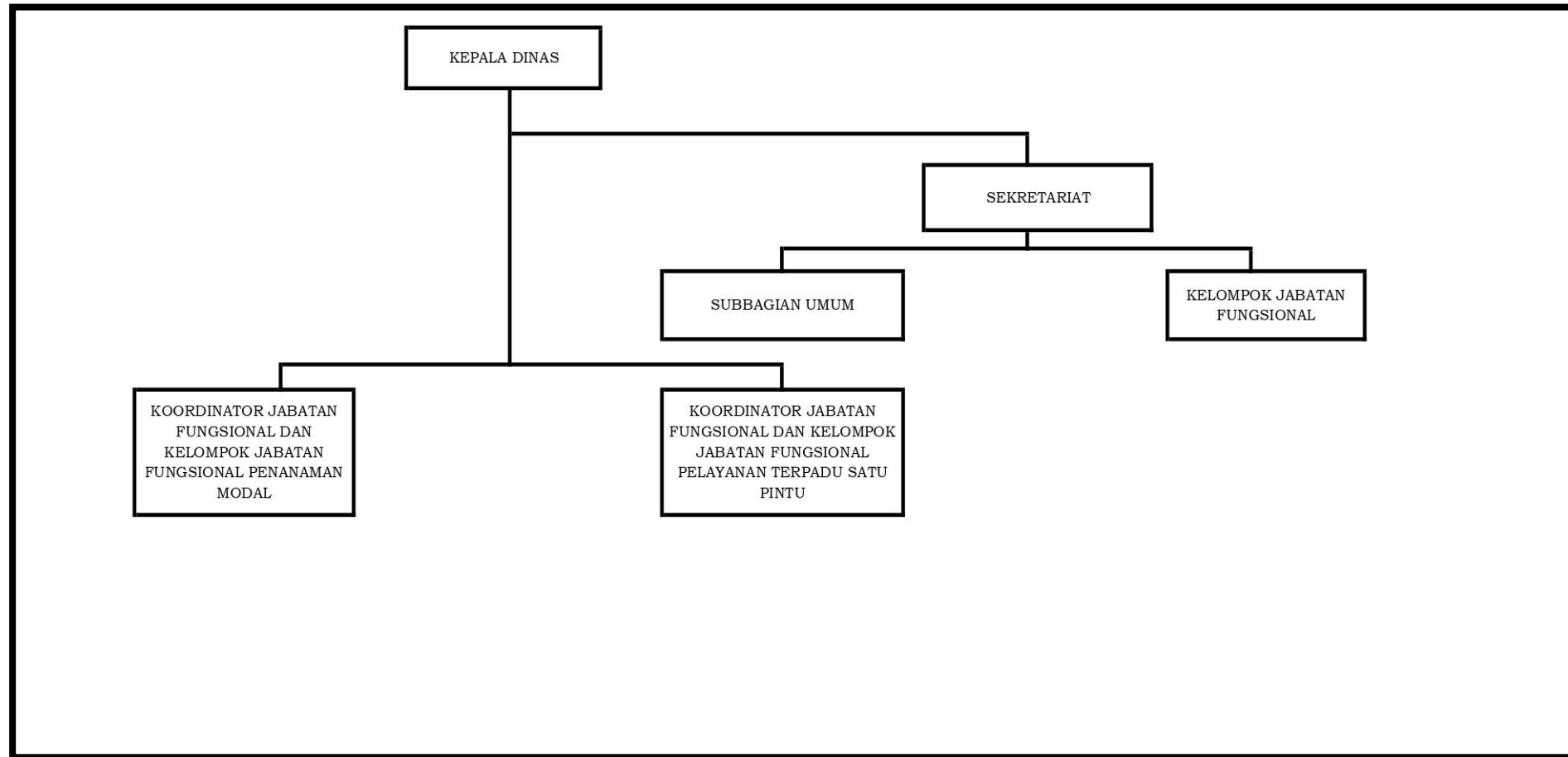
11. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Menyenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Menyenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kordinator Penanaman Modal;
4. Kordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Keadaan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Jumlah Pemangku Jabatan Struktural	= 3	Pegawai
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	= 12	Pegawai
Jumlah Pegawai Fungsional Pelaksana	= 8	Pegawai
Jumlah Pegawai PPPK	= 2	Pegawai
Jumlah Pegawai PPPK Paruh Waktu	= 13	Pegawai
Jumlah Total Pegawai	= 38	Pegawai

Untuk mengetahui sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 1 :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Komposisi Golongan dan Eselon
Per Desember 2025

No	Tingkat pendidikan	Golongan			Jumlah	Eselon				Jumlah	Pegawai PPPK	Pegawai PPPK PW
		IV	III	II		II	III	IV	Staf			
1	Strata Dua (S2)	2	3	-	5	-	1	1	3	5	-	-
2	Strata Satu (S1)	3	9	-	12	1	-	-	11	12	2	10
3	Diploma	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
4	SLTA	-	3	2	5	-	-	-	5	5	-	3
Jumlah		5	16	2	23	1	1	1	20	23	2	13

Sumber data : Subag. Umum, Kepeg. dan Keuangan Dinas PMPTSP Kab. Kepulauan Selayar Tahun Desember 2024

Berdasarkan alokasi jumlah pegawai yang tersedia sebagaimana dalam tabel 1.1 tersebut maka jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan sudah representatif hanya saja jika dilihat dari segi pendidikannya masih ada yang belum sesuai kualifikasi dengan jabatannya.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peran penting dalam berdirinya suatu usaha karena tanpa adanya surat izin berusaha maka usaha tersebut bisa di katakan illegal. Dengan adanya izin usaha dan investasi serta pelatihan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 4706.574.000,-** dengan rincian belanja operasi **Rp. 4706.574.000,-** dan Belanja modal Rp. **165.015.000,-** selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp**4.022.134.500,-** dengan rincian belanja Operasi Rp. **3.886.499.500,-** dan belanja modal Rp. **135.635.000,-**. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp. **4.022.134.500,-** anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp. **3.718.042.814,-** dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **304.091.686,-** dengan realisasi keuangan sebanyak **92,44%**. Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang direncanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 34 sub Kegiatan.

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSP		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	71,51%	67,354 %				
					91,00%	92,44%				
					Rp. 4.022.134.500	Rp. 3.718.042.814	92,43 %			
					a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
						18.473.300,-	15.484.600.00			83,82 %
					1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
						3.000.000,-	2,949,690.00			98,32 %
					2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
						3.000.000,-	2.970,760.00			99,03 %
					3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
						2.967,800.00,-	2.818,270.00			94,96 %
					4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
						2.674.600.00,-	2.463.850.00			92,12 %
					5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
						2.956.100,-	2.826.120.00			94,96%
					6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
						1.851.300,-	1.819.910.00			98,30 %
					7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			
						2.023.500,-	1.893.780.00			93,59 %
					b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
2.767.545.155,-	2.551.847.909	92,20%								
1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan								
	2.762.232.155,-	2.547.046.809,-	92,21 %							
2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen								
	3,000,000.00	2.734.850.00	91,16%							
3) Koordinasi dan Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan								

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	00	00	00		
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen 2.4313.000.00	12 Dokumen 2.066.250.00	89,33 %		
				c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100% Rp. 8.933.300,-	100% 8.435.450,-	94,42 %		
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 1.322.800.00	2 Dokumen 1.176.000.00	88,95 %		
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 5,000,000.00	2 Dokumen 4.859.800.00	97,20 %		
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dokumen 2.610.500.00	2 Dokumen 2.399.650.00	91,92 %		
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100% Rp 177.239.500,-	100% 170.247.377,-	96,05 %		
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket 9.821.500.00	2 Paket 9.821.500.00	100%		
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen 7.620.000.00	5 Dokumen 7.400.000.00	97,11 %		
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan 159,798.000.00	50 Laporan 159.685.877.00	99,93 %		
				e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% Rp. 165.675.000	100% 152.386.800	91,97 %		
				1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit 165.675.000.00	4 Unit 152.386.800.00	91,98%		
				f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% Rp. 408.833.900	100% 389.542.063,-	95,28 %		
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Laporan 108.198.000.00	3 Laporan 92.504.968.00	85,50%		
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Laporan 300.635.900.00	3 Laporan 297.001.095.00	98,79%		
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	32 unit	32 unit			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 128.460.000	127.422.297,-	99,19 %		
				1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit 31.960.000.00	20 Unit 31.628.187.00	98,96 %		
				2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit 41.420.000.00	5 Unit 41.420.000.00	100 %		
				3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- 10.450.000.00	- 10.432.000.00	- 99,83 %		
				4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit 44.630.000.00	2 Unit 43.942.110.00	98,46 %		
				2. Program Promosi Penanaman Modal	32 investor 121.723.945.00	23 investor 80.212.700.00	65,90 %		
				a. Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan 121.723.945.00	2 Kegiatan 80.212.700.00	65,90 %		
				1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen 121.723.945.00	1 dokumen 80.212.700.00	65,90 %		
				3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	67.000 Rp. 129.740.300	92.165 124.480.032.00	95,94 %		
				a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.000 Rp. 129.740.300	92.165 124.480.032.00	95,94 %		
				1) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	204 Pelaku Usaha 50.234.000.00	284 Pelaku Usaha 48.947.063.00	97,44 %		
				2) Pengawasan Penanaman Modal	13 Kegiatan Usaha 73.964.300.00	101 Kegiatan Usaha 73.545.850.00	99,43 %		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	12	100%		
					5.542.000.00	1.987.119.00	64,14%		
				4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60%	60%		Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan belanja kegiatan	Melakukan perencanaan yang matang di awal tahun agar belanja kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu
					Rp. 4.601.000	0	0 %		
				a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 perusahaan	0 perusahaan			
					4.601.000	0	0 %		
				1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	2 dokumen			
					4.601.000	0	0 %		
				5. Program pelayanan Penanaman Modal	100%	100%		SSS	
					Rp. 75.929.100	73.870.780.00,-	97,28 %		
				a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1400 izin	776 Izin			
					Rp. 75.929.100	73.870.780.00,-	97,28 %		
				1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistim Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	776 Pelaku Usaha			
					47.819.100.00	45.760.780.00	95,70 %		
				2) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Riesiko	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha			
					5.700.000.00	5.700.000.00	100 %		
				3) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	267 Pelaku Usaha	267 Pelaku Usaha	100%		
					22.410.000.00	22.410.000.00	100 %		
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian	-	-	-		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Fasilitas/Insentif Daerah	0,-	0,-	0 %		
				6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%			
					Rp. 14.980.000	13.662.664.00,-	91.20 %		
				a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
					Rp. 14.980.000	13.662.664.00,-	91.20 %		
				1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen			
					14.980.000.00	13.662.664.00	91,20 %		

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	Ket.
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	Dinas PMPTSP					
	Urusan Penanaman Modal					
	1. Nilai SAKIP Dinas PMPTSP	%	75	67,35	89,80	
	2. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	89,55	101,76	
	4. Persentase peningkatan investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	12,00	14,19	118,25	23/162 x 100 = 14,19 %
	5. Persentase peningkatan nilai investasi PMDN berskala nasional	%	20,00	203,47	1.017,35	(82.840.471.149 - 27.297.347.421)/ 27.297.347.421 X 100% = 203,47 Terjadi peningkatan investor berskala nasional yang melaporkan LKPM di kabupaten kepulauan selayar
	6. Persentase peningkatan nilai investasi PMA	%	8,00	700,89	8.761,12	(9.325.170.413 - 1.164.337.725)/ 1.164.337.725 X 100% = 700,89 Terjadi peningkatan investor PMA yang melaporkan LKPM di kabupaten kepulauan selayar
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik	%	88,00	89,55	101,76	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Dinas PMPTSP

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Penanaman Modal					
	Dinas PMPTSP					
	1. Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	32 Perusahaan	23	71,87 %	Total investor berskala nasional di kabupaten kepulauan selayar sampai tahun 2025 sebanyak 23 investor (Investasi 1 Miliar ke atas)
	2. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	(Rp Juta)	58.000	92.165	158,91 %	Tingkat kepatuhan investor berskala nasional dalam melaporkan LKPM di tahun 2025 mengalami peningkatan
	3. Persentase Potensi untuk peluang Investasi daerah	%	100	100	100	
	4. Persentase Izin yang diterbitkan	%	100	100	100	
	5. Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	

Cat. * data sementara

2.1.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja

Tabel 2.4. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja 2025

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	$5=4-3$	$6=(4/3)*100$	7	8	9	10
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.022.234.500	3.718.042.814	304.091.686	92,44	6	57,92	12	83,60
	Dinas PMPTSP	4.022.234.500	3.718.042.814	304.091.686	92,44	6	57,92	12	83,60

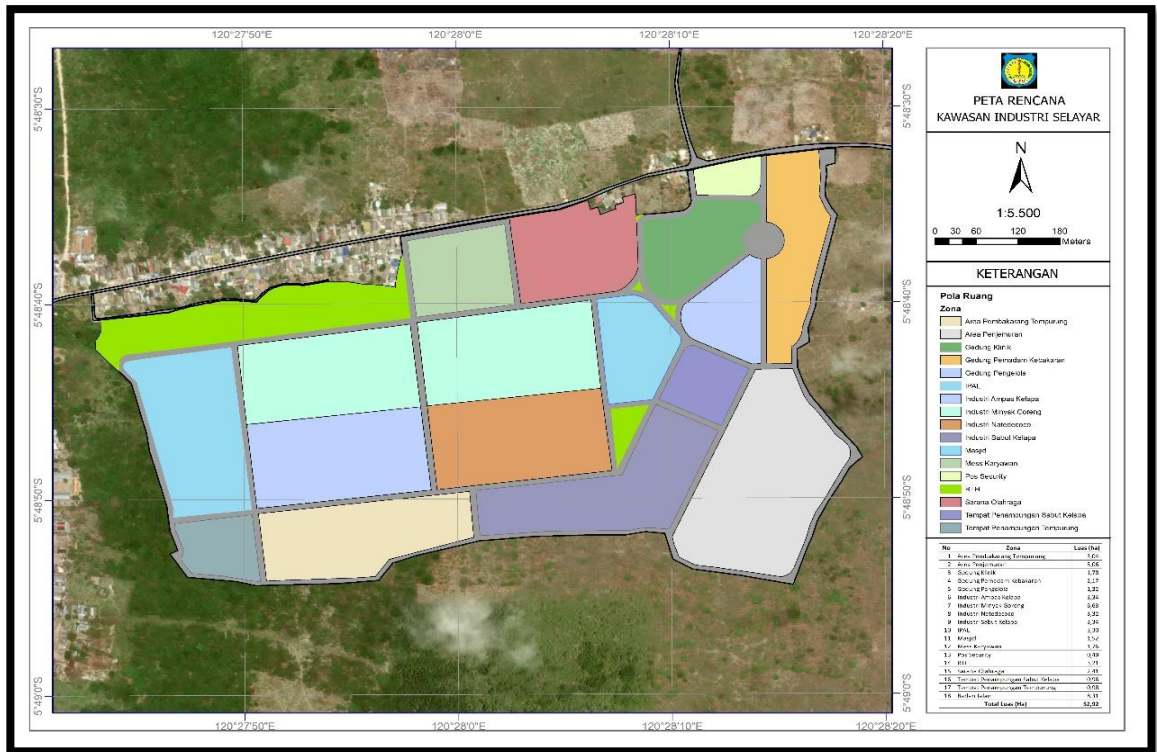
2.1.5. Inovasi

1. Program Inovasi Dinas PMPTSP

Tabel 2.5. Program Inovasi PMPTSP

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kawasan Industri Selayar (Pengolahan Kelapa Terpadu)	Proyek Kawasan Industri Selayar (KIS) (Cluster Pengolahan Kelapa Terpadu) sudah sejak lama direncanakan oleh kepala daerah sebagai Kawasan Industri Selayar dalam rangka menggali potensi masuknya proyek Industri yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain itu, potensi dari sisi menggerakkan ekonomi masyarakat lokal juga sangat memungkinkan dengan adanya Kawasan Industri Selayar (Cluster Pengolahan Kelapa Terpadu) nantinya dapat Mengembangkan Proyek-proyek industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tujuan Meningkatkan pendapatan masyarakat.	<p>Pengembangan Kawasan Industri Selayar (Cluster Pengolahan Kelapa Terpadu) penting dilakukan karena berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ekonomi Lokal <ol style="list-style-type: none"> a. Industri sebagai Sumber Pendapatan: Pengembangan Kawasan Industri, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produksi dan kepastian pasar pertanian lokal yang akan memberikan dampak positif pada pendapatan lokal. Industri yang di bangun akan meningkatkan hasil produksi pertanian sebagai bahan baku, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. b. Peluang Usaha Baru: Pengembangan ini membuka peluang usaha baru bagi penduduk lokal, seperti <i>homestay</i>, jasa transportasi dan usaha kecil lainnya yang mendukung Industri. 2. Penciptaan Lapangan Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Langsung dan Tidak Langsung: Proyek ini akan menciptakan lapangan kerja langsung dalam bentuk pekerjaan konstruksi dan operasional pergudangan, serta pekerjaan tidak langsung di sektor industri dan jasa pendukung. b. Peningkatan Keterampilan: Dengan adanya proyek ini, akan ada kebutuhan untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan di bidang mesin industri, budidaya, dan konservasi lingkungan, yang akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal. 3. Konservasi dan Pelestarian Alam <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan Keanekaragaman Hayati: Pengembangan Industri dapat diiringi dengan upaya konservasi yang lebih baik, melindungi flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut. Ini penting untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati yang mungkin terancam oleh aktivitas manusia. b. Edukasi Lingkungan: Kawasan seringkali menjadi pusat edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, tidak hanya bagi karyawan industri tetapi juga bagi masyarakat lokal. 	

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
			<p>4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur yang Lebih Baik: Pengembangan Kawasan Industri biasanya diikuti oleh peningkatan infrastruktur seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya yang juga akan dinikmati oleh masyarakat lokal. b. Akses menuju kawasan: Kawasan Industri memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di Kawasan industri, yang dapat meningkatkan kualitas hidup. <p>5. Pelestarian dan Promosi Budaya Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warisan Budaya: Proyek ini dapat menjadi platform untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal, termasuk seni, kerajinan, dan tradisi. Hal ini tidak hanya mendukung pelestarian budaya tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kepastian bahan baku industri. b. Partisipasi Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam menyediakan bahan baku dapat memperkuat identitas budaya dan memberikan rasa memiliki terhadap proyek tersebut. <p>6. Diversifikasi Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi Ketergantungan: Dengan mengembangkan sektor industri, kabupaten kepulauan selayar dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu seperti perikanan atau jasa, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan tangguh. <p>7. Peningkatan Reputasi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Competitiveness: Kawasan Industri Selayar dapat meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan produksi sehingga mampu bersaing di pasar internasional yang meningkatkan taraf hidup bagi yang terlibat didalamnya b. Education: sebagai tempat benchmarking bagi pelajar di Kawasan Industri. 	



Gambar 2.6.
Master Plan Kawasan Industri Selayar (KIS)
Cluster Pengolahan Kelapa Terpadu

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah

*“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025
tidak menginisiasi Surat Keputusan, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah”*

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

*“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025 tidak memiliki
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025”*

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

3.2. Hambatan-Hambatan

*“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2025 tidak melaksanakan Tugas
Pembantuan dan Penugasan”*

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2025 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah. Anggaran Dinas PMPTSP pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.022.134.500,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp. 3.718.042.814,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 304.091.686,- dengan realisasi keuangan sebanyak 86,82%. Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang direncanakan.

Harapan kami agar penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan di susun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus diakui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami perbaiki, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Benteng, 30 Januari 2026


Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Hj. Andi Ros Irma, S.Sos.
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19701001 199203 2 013